

Evaluasi Penerapan Akuntansi Persediaan Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Talaud

Evaluation Of The Application Of Inventory Accounting To The Personnel And Human Resources Development Agency Of The Talaud Islands Regency

Elisya Pulu¹, Harijanto Sabijono², Peter M. Kapojos³

^{1,2,3}, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl.Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

Email : elisyapulu27@gmail.com

ABSTRACT-This study aims to determine the suitability of the application of inventory accounting with applicable standard, which are set at the Agency for Personel and Human Resource Development, Talaud Islands Regency. Inventory accounting is one of the important elements in realizing good financial reports. 1. Inventory classification, 2. Inventory recognition, 3. Inventory measurement, 4. Inventory expense, 5. Inventory recording system and 6. Inventory disclosure. The applicable standard referred to in this research is Accrual-Based Inventory Accounting Standard Statement Number 5 concerning Inventory Accounting which contained in Government Regulation Number 71 of 2010. In analyzing the data is by using qualitative descriptive analysis techniques. The results of this study indicate that the inventory accounting in the Agency for Personel and Human Resources Development In the Talaud Island Regency is in accordance with applicable standards.

Keywords : Evaluation, Implementation, Inventory Accounting

ABSTRAK - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi persediaan dengan standar yang berlaku, yang ditetapkan pada Badan Pengembangan Personel dan Sumber Daya Manusia, Kabupaten Kepulauan Talaud. Inventory accounting merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan laporan keuangan yang baik. 1. Klasifikasi persediaan, 2. Pengenalan persediaan, 3. Pengukuran persediaan, 4. Biaya persediaan, 5. Sistem pencatatan persediaan dan 6. Pengungkapan inventaris. Standar yang berlaku yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pernyataan Standar Akuntansi Persediaan Berbasis AkruaI Nomor 5 tentang Akuntansi Persediaan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntansi inventarisasi di Badan Pengembangan Personel dan Sumber Daya Manusia Di Kabupaten Pulau Talaud sudah sesuai dengan standar yang berlaku.

Keywords : Evaluation, Implementation, Inventory Accounting

1. PENDAHULUAN

Akuntansi persediaan merupakan salah satu unsur penting dalam perusahaan sebagai investasi sumber kas. Persediaan juga memiliki peran penting sebagai investasi sumber daya yang besar nilainya dan berpengaruh terhadap aktivitas operasional perusahaan. Persediaan yang dimiliki oleh perusahaan harus dicatat dengan tepat karena akan berpengaruh pada penyajian laporan keuangan. Setiap perusahaan atau instansi mempunyai jenis dan kondisi persediaan yang berbeda, maka perlu bagi perusahaan untuk memilih metode pencatatan yang sesuai dengan keadaan persediaannya. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) merupakan instansi atau badan yang memiliki tugas yaitu menyelenggarakan sebagian kewenangan daerah di bidang manajemen kepegawaian, dan melaksanakan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pada tanggal 22 Oktober 2010, Pemerintah telah menerbitkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 menggantikan PP Nomor 24 Tahun 2005, kemudian mengalami lagi perubahan menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 mengenai hal yang sama. Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana setiap transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Peraturan Pemerintah Indonesia untuk seluruh instansi pemerintah baik yang ada di pusat maupun di daerah harus sudah menerapkan SAP berbasis akrual. SAP Berbasis akrual adalah SAP yang mengakui

Diterima: 16-06-2022; Disetujui untuk Publikasi: 13-07-2022

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum
p-ISSN: 24072-361X

pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD diatur oleh (PP No 12 Tahun 2019).

Persediaan merupakan barang-barang yang dimiliki suatu instansi untuk dijual kembali. Untuk perusahaan pabrik, yang termasuk dalam persediaan adalah barang-barang yang digunakan untuk proses produksi selanjutnya. Soemarso (2008:411), menjelaskan bahwa persediaan dalam perusahaan terdiri dari persediaan barang baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Persediaan juga dapat diartikan sebagai suatu barang yang dipakai untuk mencapai tujuan, contohnya barang tersebut diproses dan dijadikan produk untuk dijual kembali. Dalam pencatatan persediaan belum dilakukan dengan sempurna dikarenakan terdapat berbagai faktor seperti kurangnya pengetahuan pada metode ini untuk pencatatan dan penilaian, ketidaktahuan pihak instansi dalam penerapan metode yang sesuai.

Berdasarkan uraian di atas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Evaluasi Penerapan Akuntansi Persediaan Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Talaud”.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi penerapan akuntansi persediaan yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Talaud.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Sektor Publik

Menurut Indra (2010:3) menjelaskan bahwa akuntansi sektor publik merupakan sistem akuntansi yang digunakan pada organisasi publik. Akuntansi sektor publik merupakan teknik akuntansi yang digunakan pada pengelolaan dana masyarakat pada pemerintahan dan proyek kerjasama sektor swasta. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dana masyarakat merupakan dana milik publik yang digunakan oleh organisasi sektor publik. Menurut Mardiasmo (2004:143), teori akuntansi sektor publik memiliki tiga karakteristik dasar yaitu mampu untuk menjelaskan dan menerangkan fenomena yang ada, mampu untuk memprediksi, dan mampu untuk mengendalikan fenomena. Juga terdapat tiga tujuan untuk mempelajari teori akuntansi yaitu: untuk memahami praktik akuntansi yang ada saat ini, mempelajari kelemahan atau kekurangan dan praktik akuntansi yang ada saat ini dan untuk memperbaiki praktik akuntansi yang saat ini dilakukan. Hal ini dilakukan dengan adanya keterkaitan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dapat menyajikan informasi keuangan yang relevan. Agar laporan keuangan signifikan, terdapat berbagai masalah yang dihadapi, yaitu objektivitas, konsistensi, daya banding, tepat waktu, ekonomi dalam penyajian laporan, dan materialistik.

2.2. Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintah dapat didefinisikan menjadi suatu aktivitas suatu pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasikan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut. Jenis yang dicatat didalam akuntansi pemerintahan adalah transaksi keuangan pemerintah yang sebagian akan memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan dengan transaksi dalam akuntansi bisnis. Pengguna informasi keuangan pemerintah antara lain rakyat secara umum yang diwakili oleh lembaga legislatif, pemerintah sendiri, kreditor seperti bank dunia.

2.3. Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Hendri (2020:8), Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintahan pusat dan departemen-departemennya maupun di pmda dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD diatur oleh (PP No 12 Tahun 2019). Standar akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan yang memiliki kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Selain itu, standar akuntansi pemerintahan juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan laporan keuangan pemerintah, termasuk mendukung pelaksanaan penerapan standar tersebut.

2.4. Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

Mahmudi (2011:271) menjelaskan bahwa standar akuntansi pemerintah digunakan sebagai acuan karena pentingnya SAP dalam ruang lingkup pemerintahan, maka SAP harus lebih dikembangkan lagi untuk menciptakan laporan keuangan yang baik dan benar Mahmudi.

Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 menjelaskan bahwa standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintah yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam susunan laporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang telah ditetapkan dalam APBN /APBD.

2.5 Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksud adalah untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Zulfikarijah (2005:9) menjelaskan bahwa persediaan secara umum didefinisikan sebagai stock bahan baku yang digunakan untuk jalannya sebuah produksi atau untuk memuaskan permintaan konsumen..

2.6. Klasifikasi Persediaan

Dalam PSAP BA No.5 Paragraf 5 PP No. 71 tahun 2010 dijelaskan bahwa suatu aset dapat diklasifikasikan sebagai persediaan apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

1. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. Termasuk dalam kelompok ini adalah barang habis pakai misalnya alat tulis kantor, dokumen administrasi, listrik dan lain sebagainya. Barang tak habis pakai misalnya komponen peralatan kantor seperti meja dan kursi, lemari, cap tanggal, komputer, mesin fotocopy, dan lain sebagainya.
2. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi.
3. Barang dalam proses produksi dengan maksud dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

2.7. Pengakuan Persediaan

Berdasarkan PSAP BA No. 5 Paragraf 13 PP No. 71 Tahun 2010, persediaan diakui sebagai berikut :

1. Pada saat potensi manfaat ekonomi pada masa yang akan datang diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur.
2. Pada saat telah diterima atau hak kepemilikannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventaris fisik. Pengakuan persediaan berdasarkan PSAP BA menggunakan basis akrual. Dalam penyusunan laporan realisasi anggaran, perolehannya hanya dicatat sebagai belanja barang dan memengaruhi perkiraan estimasi, sementara untuk penyusunan laporan operasional, pembelian persediaan akan dicatat sebagai beban persediaan dan pengeluaran kas.

2.8. Pengukuran Persediaan

Dalam pengukuran persediaan, terdapat beberapa hal untuk mengukur nilai persediaan berdasarkan PSAP BA No. 5 PP No 71 Tahun 2010 yaitu :

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.
2. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi, dan biaya tidak langsung dialokasikan secara sistematis.
3. Harga atau nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga atau nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

Untuk penilaian persediaan terdapat tiga metode yang dapat digunakan yaitu sebagai berikut :

1. Metode FIFO (First In First Out), yaitu nilai barang yang pertama dibeli merupakan nilai barang yang dipakai/dijual/diserahkan, sedangkan nilai persediaan akhir dihitung mulai dari harga pembelian terakhir,
2. Metode LIFO (Last In First Out) merupakan harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan tidak material dan bermacam jenis, maka nilai persediaan akhir dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir.

3. Metode rata-rata tertimbang (Weighted Average) dimana harga pokok merupakan harga rata-rata keseluruhan barang yang dimiliki, oleh karena itu nilai persediaan akhir dihitung berdasarkan harga rata-rata per unit.

2.9. Sistem Pencatatan Persediaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 64 Tahun 2010 terdapat dua metode sistem pencatatan persediaan yaitu:

- a. Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya continues dan membutuhkan kontrol yang besar. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai atau jumlah persediaan selalu diperbaharui.
- b. Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat tulis kantor. Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak mempengaruhi jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan stock opname pada akhir periode..

2.10. Pengungkapan Persediaan

Dalam PSAP BA No. 5 Paragraf 26 PP No. 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa beberapa hal yang dinilai perlu untuk diungkapkan dalam laporan keuangan berhubungan dengan persediaan meliputi :

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan
2. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat
3. Jenis, jumlah dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

2.11 Penelitian Terdahulu

1. Irawaty, Sudrajat, Mohammad (2017), Evaluasi Penerapan Akuntansi Persediaan Pada PT XYZ Cabang Sumbawa Besar. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PT XYZ melakukan pencatatan atas transaksi persediaannya dengan menggunakan sistem pencatatan perpetual. Karena memudahkan perusahaan untuk mengetahui jumlah saldo persediaan, dan tidak melakukan stock opname atau perhitungan fisik persediaan karena setiap pembelian fisik langsung dicatat dalam rekening persediaan.
2. Waworega, Manosoh, dan Tangkumam (2018), Analisis Penerapan Akuntansi Persediaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Minahasa. Hasil penelitian menemukan Akuntansi Persediaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Minahasa telah sesuai dengan PSAP No. 5.
3. Rondonuwu (2016), Evaluasi Penerapan Metode Persediaan Berdasarkan Metode FIFO pada PT. Honda Tunas Dwipa Matra Manado. Penelitian ini menyimpulkan pada Penerapan metode FIFO dan sistem pencatatan Perpetual oleh perusahaan sudah baik dan sesuai. Metode FIFO pada akhir persediaan akhir dinilai dengan harga pokok pembelian yang paling akhir.
4. Rifai (2017), Evaluasi Kebijakan Akuntansi Dalam Pengukuran Persediaan Sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 5 tentang Persediaan Pada Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Utara. Hasil penelitian Menjelaskan bahwa prosedur pencatatan persediaan sudah sesuai dengan kebijakan akuntansi tapi masih terdapat kendala dalam persediaan administrasi umum, seperti kebutuhan habis pakai yang dibutuhkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Utara kurang dari persediaan standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Kapa dkk (2021), Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Tanah Berdasarkan PSAP Pada BKD Kabupaten Nagekeo. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa di BKD Kabupaten Nagekeo ada relevansi antara Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Nagekeo No. 32 Tahun 2014 dengan PSAP 07 mengenai akuntansi aset tetap, mengakibatkan BKD Kabupaten Nagekeo sudah mempraktikkan akuntansi atas aktiva tetap tanah secara optimal..

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (Sugiyono,

2018:213). Penelitian ini bertujuan untuk Mengevaluasi Penerapan Akuntansi Persediaan Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Talaud. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti, sehingga memudahkan untuk mendapatkan data yang objektif dalam Evaluasi Penerapan Akuntansi Persediaan Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Talaud.

3.2. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu membahas masalah dengan cara mengumpulkan, menguraikan, menghitung, dan membandingkan suatu keadaan serta menjelaskan suatu keadaan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang meliputi Evaluasi Penerapan Akuntansi Persediaan Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Talaud.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 05 pada bagian umum menjelaskan bahwa persediaan merupakan aset yang berupa:

1. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah.
2. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi.
3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Talaud, Bapak Sumarto Majore (Sekertaris), Ibu Sinthia Kasili (Kasubag Keuangan) dan Bapak Jelbi Eris (Kasubag Perencanaan) mengungkapkan bahwa: “Di kantor ini persediaannya dikategorikan dalam tiga jenis yaitu persediaan alat tulis kantor, persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) dan persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih”.

Tabel 1. Persediaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Talaud Tahun 2020

Jenis Persediaan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Alat Tulis Kantor	206.873.440,-	202.229.050,-
Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	18.475.000,-	18.463.500,-
Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.976.300,-	5.976.300,-

Sumber : BKPSDM Kabupaten Kepulauan Talaud (2020)

Berdasarkan Tabel 1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Talaud membuat perencanaan anggaran persediaan berdasarkan kebutuhan persediaan di tahun anggaran yang akan datang seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris dan Kasubag perencanaan pada wawancara mengatakan bahwa: “Perhitungan kebutuhan persediaan berdasarkan data yang diperoleh dari tahun ke tahun, persediaan diestimasi untuk memperkirakan kebutuhan persediaan di tahun selanjutnya”.

Pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 05 Persediaan menyatakan bahwa dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis atau untuk tujuan berjaga-jaga, barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dilihat bahwa persediaan yang digunakan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Talaud adalah berupa persediaan alat tulis kantor, persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) dan persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Talaud juga menganggarkan Persediaan cadangan untuk mengantisipasi peristiwa tak terduga seperti bencana alam. Oleh karena itu dalam hal mengklasifikasi aset persediaan sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PSAP 05 tentang Persediaan

Klasifikasi Persediaan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Talaud, untuk klasifikasi persediaan terbagi atas beberapa

persediaan seperti yang diungkapkan oleh informan berdasarkan hasil data wawancara yang diperoleh di lokasi yaitu :

1. Alat tulis kantor (barang cetakan, perangko, dan materai)
2. Alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
3. Peralatan kebersihan dan bahan pembersih.

Kemudian dalam hasil data penelitian juga dijelaskan bahwa persediaan juga telah diakui karena barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintahan.

Pengakuan Persediaan

Berdasarkan hasil penelitian, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Talaud mengakui persediaan alat tulis kantor, persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) dan persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih pada saat barang benar-benar diterima beserta kelengkapan dokumen-dokumennya, namun terlebih dahulu dilakukan perencanaan anggaran untuk satu tahun ke depan berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai bagian keuangan. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 05 persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal serta pada saat diterima atau hak kepemilikannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Dalam perencanaan pemesanan persediaan alat tulis kantor, persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) dan persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Talaud memperhitungkan persediaan yang dibeli agar anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan dan juga memperhitungkan dengan rata-rata perbulan, namun dikalikan dengan satu setengah tahun yang ditujukan sebagai rata-rata kemungkinan yang dibutuhkan untuk tahun depan.

Pengukuran Persediaan

Berdasarkan hasil penelitian, persediaan alat tulis kantor, persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) dan persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Talaud tersebut sudah merinci dalam e-katalog (e-purchasing). Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Talaud akan membayar apabila barang yang dipesan sudah datang terlebih dahulu dan sudah sesuai dengan kriteria yang dipesan. Untuk pelaporan barang diungkapkan sesuai dengan harga perolehan, karena barang yang didapatnya dari pembelian baik dari e-katalog maupun dari pihak luar. Berdasarkan hasil penelitian, seluruh pembelian dan pencatatan persediaan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Talaud menggunakan metode FIFO. Metode sistematis FIFO (First In First Out) adalah metode pengukuran nilai persediaan dimana persediaan yang pertama kali masuk itulah yang pertama kali dicatat sebagai barang yang digunakan. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dari harga pembelian terakhir.

Beban Persediaan

Berdasarkan hasil penelitian, penghitungan beban persediaan yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Talaud dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional. Pernyataan tersebut sesuai dengan laporan yang disajikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Talaud bahwa pada laporan operasional juga mencantumkan beban persediaan.

Sistem Pencatatan Persediaan

Berdasarkan hasil penelitian, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Talaud membuat perencanaan anggaran persediaan berdasarkan kebutuhan persediaan di tahun anggaran yang akan datang seperti yang diungkapkan oleh Informan pada wawancara mengatakan bahwa : “perhitungan kebutuhan persediaan berdasarkan data yang diperoleh dari tahun ke tahun, persediaan diestimasi untuk memperkirakan kebutuhan persediaan di tahun selanjutnya”, dan menggunakan metode pencatatan berdasarkan metode periodik. Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak mempengaruhi jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan stock opname di akhir periode

Pengungkapan Persediaan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Talaud, persediaan diungkapkan berdasarkan kebijakan akuntansi. Kemudian dilakukan juga pengungkapan persediaan barang atau perlengkapan yang

digunakan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Kemudian di jelaskan pula mengenai persediaan dan juga perlengkapan lainnya yang masuk di kantor biasanya langsung dicatat dalam buku barang, yang pastinya dengan menggunakan aturan prosedur penata usahaan barang persediaan yang baik dan benar.

4.2. Pembahasan

Klasifikasi Persediaan

Persediaan yang ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Talaud telah diakui karena barang atau perlengkapan yang digunakan adalah dalam rangka kegiatan operasional pemerintahan. Kemudian dalam pengklasifikasian persediaan yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Talaud dinyatakan bahwa persediaan terbagi atas tiga dilihat dari laporan realisasi anggaran yaitu :

1. Alat tulis kantor (barang cetakan, perangko, dan materai),
2. Alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering), dan
3. Peralatan kebersihan dan bahan pembersih.

Berdasarkan PSAP BA No. 05 PP No. 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa aset dapat diklasifikasikan sebagai persediaan apabila telah memenuhi suatu kriteria sebagai berikut :

1. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintahan.
2. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi. Yang termasuk persediaan dalam kelompok ini meliputi bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku konstruksi bangunan yang akan diserahkan kepada masyarakat atau pemda.
3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Contoh persediaan yang termasuk dalam kelompok ini yaitu alat pertanian setengah jadi/barang hasil proses produksi yang belum selesai yang akan diserahkan kepada masyarakat/pemda.
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. contohnya yaitu hewan, tanaman, tanah/bangunan/peralatan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda.

Berdasarkan hasil data observasi diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pengklasifikasian persediaan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Talaud telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang terdapat dalam PSAP No.05. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Waworega, Manosoh dan Tangkuman (2018) yang menunjukkan bahwa evaluasi penerapan akuntansi persediaan yang telah dilakukan sudah sesuai Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan No 05 tentang akuntansi persediaan, yang menjelaskan tentang klasifikasi persediaan yang mencakup barang habis pakai yaitu alat tulis kantor yang berupa barang cetakan, perangko, dan materai, alat listrik dan elektronik yang berupa lampu pijar, battery kering, dan peralatan kebersihan serta alat pembersih.

Pengakuan Persediaan

Berdasarkan hasil data observasi, pada saat melakukan perencanaan pemesanan persediaan alat tulis kantor, persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) dan persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Talaud memperhitungkan persediaan yang dibeli agar anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan. Pada akhir periode akuntansi, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik, kemudian mengakui persediaan alat tulis kantor, persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) dan persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih, saat barang benar-benar diterima beserta dengan kelengkapan dokumen-dokumennya, namun terlebih dahulu dilakukan perencanaan anggaran untuk satu tahun ke depan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Talaud memperhitungkan dengan rata-rata perbulan, namun dikalikan dengan satu setengah tahun yang ditujukan sebagai rata-rata kemungkinan yang dibutuhkan untuk tahun depan.

Maka dapat disimpulkan bahwa, pengakuan persediaan yang ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Talaud telah sesuai dengan standar yang berlaku dalam PSAP No. 05 Paragraf 13.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ardhiyanto (2019) yang menjelaskan bahwa pengakuan persediaan telah sesuai dengan PSAP No 05, yang akan benar-benar diakui pada saat barang sudah ada, dan benar-benar diterima bersamaan dengan nota pesanan beserta dengan dokumen kelengkapan lainnya.

Pengukuran Persediaan

Berdasarkan hasil penelitian, seluruh pembelian dan pencatatan persediaan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Talaud menggunakan metode FIFO. Metode sistematis FIFO (First In First Out) adalah metode pengukuran nilai persediaan dimana persediaan yang pertama kali masuk itulah yang pertama kali dicatat sebagai barang yang digunakan. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dari harga pembelian terakhir. Kemudian untuk persediaan alat tulis kantor, persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) dan persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih dicatat sesuai dengan harga beli. Dan harga beli merupakan bagian dari harga perolehan. Dan untuk persediaan tersebut sudah merinci dalam e-katalog (e-purchasing).

Menurut PSAP No. 05 Paragraf 17 PP No 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa persediaan dapat dinilai dengan menggunakan :

1. Metode FIFO (First In First Out), yaitu nilai barang yang pertama dibeli merupakan nilai barang yang dipakai/dijual/diserahkan, sedangkan nilai persediaan akhir dihitung mulai dari harga pembelian terakhir,
2. Metode LIFO (Last In First Out) yaitu harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan tidak material dan bermacam jenis, maka nilai persediaan akhir dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir.
3. Metode rata-rata tertimbang (Weighted Average) dimana harga pokok merupakan harga rata-rata keseluruhan barang yang dimiliki, oleh karena itu nilai persediaan akhir dihitung berdasarkan harga rata-rata per unit.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 05 Paragraf 15 PP No. 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa persediaan dapat diukur berdasarkan :

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian,
2. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Talaud telah sesuai dengan PSAP No. 05 Paragraf 15. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hendri (2020) yang dijelaskan bahwa persediaan diakui pada saat persediaan alat tulis kantor memiliki manfaat dan mempunyai nilai, dan diakui pada saat terdapat berita acara penyerahan barang dan surat perjanjian kerja.

Beban Persediaan

Berdasarkan hasil penelitian, penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional. Berdasarkan hasil wawancara bersama informan, pernyataan ini sesuai dengan laporan yang disajikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Talaud bahwa pada laporan operasional juga mencantumkan beban persediaan. Berdasarkan PSAP No. 05 paragraf 22 dijelaskan bahwa beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Maka dapat disimpulkan bahwa beban persediaan yang ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Talaud telah sesuai PSAP BA No. 05.

Sistem Pencatatan Persediaan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Talaud menggunakan metode pencatatan berdasarkan metode periodik yang termuat dalam Permendagri No 64 tahun 2010. Dalam metode pencatatan berdasarkan Permendagri No 64 dijelaskan bahwa pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan sehingga tidak mempengaruhi jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan stock opname di akhir periode. Sedangkan berdasarkan aturan yang ada di PSAP No 05 dijelaskan bahwa pencatatan persediaan berdasarkan metode periodik hanya menguraikan tentang pengukuran pemakaian persediaan berdasarkan inventaris fisik dengan cara saldo awal ditambah pembelian/perolehan persediaan dikurangi saldo akhir persediaan, kemudian dikali nilai per unit.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 64 Tahun 2013 terdapat dua metode sistem pencatatan persediaan yaitu :

1. Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya continues dan membutuhkan kontrol yang

besar. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai atau jumlah persediaan selalu diperbaharui.

2. Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak mempengaruhi jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan stock opname pada akhir periode.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Talaud menggunakan metode pencatatan berdasarkan metode periodik yang termuat dalam Permendagri No 64 Tahun 2013, dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Rozak (2015) yang menjelaskan bahwa untuk pencatatan akuntansi tidak langsung dilakukan disetiap kegiatan, melainkan pencatatan akuntansi persediaan digunakan mengikuti Permendagri No 64 tahun 2013.

Pengungkapan Persediaan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di BKPSDM Kabupaten Kepulauan Talaud dijelaskan bahwa persediaan diungkapkan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam rangka pengukuran persediaan. Berdasarkan PSAP BA No. 5 Paragraf 26 PP No. 71 Tahun 2010 dijelaskan beberapa hal yang dinilai perlu untuk diungkapkan dalam laporan keuangan berhubungan dengan persediaan meliputi :

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.
2. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat,
3. Jenis, jumlah dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

Pada poin pertama dinyatakan telah sesuai dengan PSAP No. 05 yang menyebutkan bahwa laporan keuangan mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan akhir, akan tetapi pada point kedua mengenai barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan kepada masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan point ketiga mengenai barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan kepada masyarakat dan point ketiga mengenai jenis, jumlah dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang dinyatakan tidak sesuai dengan PSAP No 05. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Talaud tidak mengungkapkan hal tersebut dikarenakan tidak ada data persediaan yang memenuhi kriteria tersebut.

5. KESIMPULAN

Penerapan akuntansi atas persediaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Talaud sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (PSAP BA) No. 05 tentang akuntansi persediaan. Klasifikasi persediaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Talaud telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (PSAP BA) No 05. Pengakuan persediaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Talaud dapat diakui apabila barang persediaan sudah benar benar diterima dan sesuai dengan permintaan yang dipesan. Hal tersebut sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (PSAP BA) No 05. Pengukuran persediaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Talaud sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (PSAP BA) No 05. Beban persediaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Talaud telah mengikuti Standar Yang berlaku dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (PSAP BA) No 05. Sistem pencatatan persediaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Talaud telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (PSAP BA) No 05. Pengakuan persediaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Talaud telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (PSAP BA) No 05 Paragraf 26, PP No 71 tahun 2010.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhiyanto Dwi. 2019. *Perlakuan Akuntansi Persediaan Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Kota Batu*. Skripsi. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Halim, A. 2016, *Pengantar Akuntansi*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Hendri, W., Mariati. M., & Tamsil, T. 2020. *Penerapan PSAP 05 Tentang Akuntansi Persediaan Pada Kantor Inspektorat Kab. Banteng*. Accounting Journal, 1(4), 78-85
- Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta : Erlangga.
- Irawaty., Sudrajat., Muhhamad. 2017. *Evaluasi Penerapan Akuntansi Persediaan Pada PT XYZ Cabang Sumbawa Besar*. Jurnal JEBI Vol. 02, No. 02 pp.1-8.
- Kapa, S., Nuraini, I., Florida. 2021. *Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Tanah Berdasarkan PSAP Pada BKD Kabupaten Nagekeo*. P-ISSN : 2579-969X ; E-ISSN : 2622-7940. Jurnal Riset Terapan Akuntansi, Vol. 5 No. 2 2021.
- Mahmudi. 2011. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Andi
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 71 tahun 2010 Nomor 21. 2011. *Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri*. Nomor 13 Tahun. 2006 *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Standar Akuntansi Berbasis Akrual*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Sekretariat Negara : Jakarta.
- Rifai, R. P. 2017. *Evaluasi Kebijakan Akuntansi Dalam Pengukuran Persediaan Sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 05 Tentang Persediaan Pada Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Utara*. Jurnal EMBA Vol.5. No.1, Maret 2016, Hal, 11-19.
- Rondonuwu, G. 2016. *Evaluasi Penerapan Metode Persediaan Berdasarkan Metode FIFO pada PT. Honda Tunas Dwipa Matra Manado*. ISSN 2303-1174. Jurnal EMBA Vol. 4 No. 4 Sept 2006, Hal 268-278.
- Rozak. 2015. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 05 Tentang Akuntansi Persediaan Dalam Meningkatkan Internal Control Persediaan Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis*. ISSN 2355-7478. Jurnal Wawasan dan Riset Akuntansi Vol. 2 No. 2 Maret 2015, Hal. 113-130.
- Soemarso. 2008. *Akuntansi Dasar dan Aplikasi dalam Bisnis*. Jakarta Barat Indeks.
- Sugiyono 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Waworega, A. A., Manossoh, H., & Tangkuman. 2018. *Analisis Penerapan Akuntansi Persediaan Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa*. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi, 13(04)
- Zulkfikarijah. 2005. *Manajemen Persediaan*. Malang. Universitas Muhammadiyah Malang.